

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sosialisasi pajak dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Penelitian ini juga menggunakan pemanfaatan teknologi informasi sebagai variabel moderasi. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *simple random sampling* dan rumus *Slovin* untuk menentukan jumlah reponden yang dibutuhkan. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 100 Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang. Data yang telah dikumpulkan diuji menggunakan SmartPLS 4.0 dengan metode PLS-SEM. Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Sosialisasi perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Temuan ini membuktikan bahwa sosialisasi pajak yang terlaksana kurang efektif dan relevan bagi Wajib Pajak UMKM sehingga perlu adanya perancangan ulang agar ke depannya sosialisasi pajak yang dilakukan dapat berdampak secara positif bagi Wajib Pajak UMKM.
2. Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hal ini

membuktikan bahwasanya sistem administrasi perpajakan yang modern lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaannya, sekaligus memudahkan masyarakat untuk menjalankan tanggung jawab perpajakannya.

3. Pemanfaatan teknologi informasi tidak memperkuat pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Temuan tersebut membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam bentuk penggunaan media sosial sebagai sarana untuk menyalurkan sosialisasi pajak masih belum maksimal dan memiliki banyak hal yang harus dibenahi agar ke depannya dapat menyediakan informasi yang dapat lebih mudah diterima oleh masyarakat.
4. Pemanfaatan teknologi informasi memperkuat pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Temuan tersebut mengindikasikan bahwasanya teknologi informasi yang dimanfaatkan untuk penyediaan fasilitas pelayanan administrasi pajak yang lebih memadai dan modern dapat meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan tanggung jawab Wajib Pajak, sehingga mendorong kenaikan Wajib Pajak yang patuh.

5.2 Keterbatasan

Peneliti menghadapi sejumlah keterbatasan selama melakukan penelitian ini, yaitu sebagai berikut.

1. Berdasarkan hasil uji *R-Square*, variabel sosialisasi pajak dan modernisasi sistem administrasi perpajakan hanya mampu menjelaskan variabel kepatuhan Wajib Pajak UMKM sebesar 62,6%, sedangkan 37,4% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti di penelitian ini.
2. Tidak disajikannya data kepatuhan Wajib Pajak UMKM secara spesifik di Kota Semarang pada bagian latar belakang. Penelitian hanya menyajikan data nasional berupa realisasi penerimaan pajak, sehingga belum sepenuhnya menunjukkan kondisi lokal yang menjadi fokus utama penelitian.
3. Selama pengumpulan data, tidak semua Wajib Pajak UMKM yang dikunjungi bersedia mengisi kuesioner mengenai perpajakan, mengingat pajak masih dianggap sebagai topik yang sensitif bagi mereka. Selain itu, beberapa responden tidak mengisi kuesioner secara lengkap sehingga data yang dikumpulkan tidak dapat dimasukkan dan diperhitungkan dalam penelitian.

5.3 Saran

1. Bagi Wajib Pajak UMKM

Diharapkan bahwa Wajib Pajak UMKM meningkatkan keterlibatan mereka dalam program sosialisasi pajak yang dijalankan oleh pemerintah, Direktorat Jenderal Pajak, dan lembaga lainnya, baik secara tatap muka maupun melalui *platform* digital. Wajib Pajak UMKM juga disarankan untuk aktif mencari informasi perpajakan dengan memanfaatkan media sosial dan *website* Direktorat Jenderal Pajak yang telah menyediakan informasi berbentuk konten pada *platform* yang disediakan. Melalui kegiatan tersebut, Wajib Pajak UMKM dapat lebih memahami mengenai kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan.

2. Bagi Pemerintah/Direktorat Jenderal Pajak

Pengoptimalan pemanfaatan teknologi informasi dalam menyebarkan informasi perpajakan, seperti penggunaan media sosial dan *platform* digital lainnya dengan konten informasi yang lebih menarik dan berkualitas oleh Pemerintah/Direktorat Jenderal Pajak harus terus dilaksanakan. Diharapkan juga bahwa pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak akan terus menciptakan sistem administrasi pajak yang canggih berbasis teknologi ini. Peningkatan kepatuhan wajib pajak akan terdorong secara tidak langsung oleh perbaikan kualitas sistem administrasi yang mampu meningkatkan efektivitas dan kenyamanan penggunaan bagi wajib pajak.

3. Bagi penelitian selanjutnya

Karena ruang lingkup penelitian ini terbatas pada Kota Semarang, diharapkan peneliti selanjutnya dapat memperluas ruang lingkungannya. Peneliti selanjutnya juga dapat memperdalam topik pemanfaatan teknologi informasi, terkhusus penggunaan media sosial untuk penelitian selanjutnya. Juga disarankan agar peneliti selanjutnya menggunakan atau memasukkan lebih banyak variabel yang berpotensi mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak UMKM.